

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak negara, termasuk di negara Indonesia. Begitu seriusnya masalah ini sehingga dalam setiap rencana-rencana pembangunan ekonomi masyarakat, selalu dikatakan dengan tujuan menurunkan angka pengangguran, namun pengangguran tetap saja terjadi, baik di kota maupun di desa, yang disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja (Ardian *et al.*, 2022). Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kriminalitas dan juga masalah sosial politik yang juga semakin meningkat dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat persoalan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks (Mifrahi & Darmawan, 2022a).

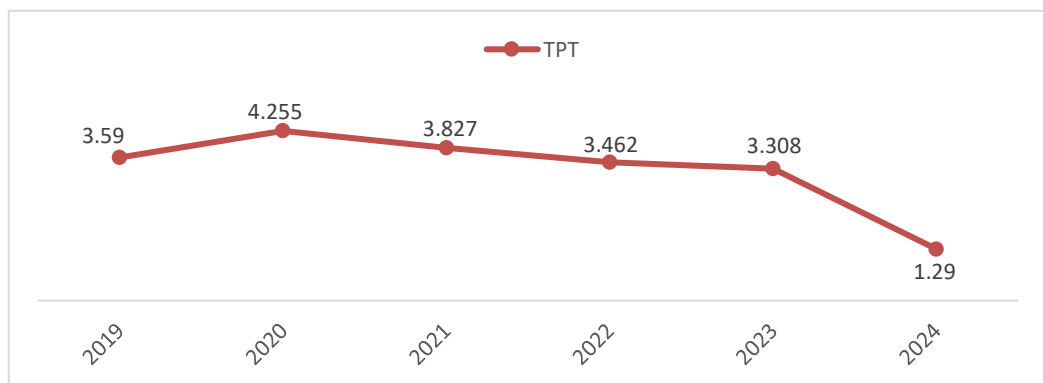
Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan (Ardian *et al.*, 2022). Pengangguran juga bisa terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur (S. S. Ningrum, 2017). Salah satu penyebab utama pengangguran adalah ketidaksesuaian antara pertumbuhan angkatan kerja yang pesat dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas (Prawira, 2018).

Pengangguran dapat di tekan oleh pemerintah dengan kebijakannya, jika pemerintah dapat dengan tepat membuat suatu kebijakan tentang pengangguran maka masalah pengangguran akan dapat teratasi,tetapi jika sebaliknya bila kebijakan pemerintah itu gagal maka masalah pengangguran akan tetap ada dan tidak menutup kemungkinan bertambahnya pengangguran (Johan et al., 2016).

Dari aspek sosial semakin banyaknya jumlah pengangguran akan mengakibatkan naiknya jumlah Masyarakat miskin. Akibatnya, keadaan tersebut ikut berpengaruh pada meningkatnya angka tindak criminal seperti pencurian perampokan dan sebagainya sebagai konsekuensi dari sulitnya mencari lahan pekerjaan. Selain menimbulkan dampak negatif pada perekonomian, penganggura juga berdampak pada ketidakstabilan sosial politik (Mahdar,2015).

Diagram dibawah ini dapat dilihat perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 1980 sampai 2024 yaitu :

**Grafik 1.1**  
**Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2019-2024**



sumber : Bank Indonesia 2025

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2019 mengalami penurunan hingga 3,59% karena kondisi ekonomi pada saat itu cukup stabil, ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan investasi serta

sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan pengangguran menjadi sekitar 4,25% akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak sektor usaha, terutama pariwisata, transportasi, dan industri kecil, mengalami penurunan aktivitas bahkan penutupan, sehingga banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Selanjutnya, mulai tahun 2021 hingga 2024, tingkat pengangguran kembali menurun seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, peningkatan kegiatan produksi, dukungan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi, serta adaptasi dunia kerja terhadap sistem digital dan kerja fleksibel yang membuka peluang kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia mulai pulih dan menunjukkan tren positif pasca-pandemi.

Penurunan tingkat pengangguran menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara lebih efektif dari waktu ke waktu. Ini bisa dilihat sebagai indikator keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan infrastruktur serta pendidikan (Lestari, 2023).

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, seperti inflasi, investasi, PDB, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah, untuk memahami bagaimana kebijakan yang ada dapat lebih efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran (Dewi, 2017).

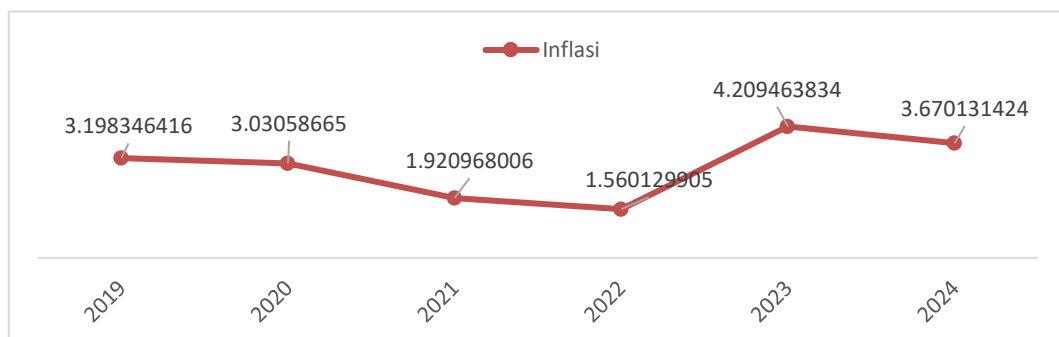
Inflasi dan pengangguran adalah dua masalah ekonomi yang utama yang sering dihadapi oleh masyarakat suatu negara. Jika masalah inflasi dan pengangguran tidak terkendali, maka kedua masalah tersebut dapat mewujudkan efek buruk baik yang bersifat ekonomi, sosial, politik serta lingkungan dan

budaya. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut, secara sederhana yakni secara ekonomi makro diperlukan berbagai kebijakan ekonomi yang komprehensif (P. S. M. Silaban & Siagian, 2021).

Tingkat inflasi menjadi salah satu penentu dari tingkat pengangguran. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum (Tamala *et al.*, 2024).

. Inflasi telah menjadi suatu fenomena ekonomi yang menarik dan penting sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih, Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) (Agustina *et al.*, 2024). Adanya dampak inflasi yang melebihi batas moderat adalah meningkatnya jumlah pengangguran (Purwa *et al.*, 2025).

**Grafik 1.2**  
**Inflasi Tahun 2019-2024**



Sumber : Bank Indonesia 2025

Tingkat inflasi di Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan hingga sekitar 3,19% karena adanya kenaikan harga bahan pokok, energi, serta dorongan permintaan domestik menjelang pemilu, yang biasanya meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021 inflasi menurun tajam hingga sekitar 1,56%, disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menekan

daya beli masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, serta menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa secara umum.

Kemudian, pada tahun 2023 inflasi kembali meningkat hingga 4,21%, dipicu oleh kenaikan harga komoditas global, terutama energi dan pangan, serta dampak lanjutan dari gangguan rantai pasokan dunia akibat situasi geopolitik dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Sementara itu, pada tahun 2024 inflasi mulai menurun menjadi sekitar 3,67% karena pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang lebih terkendali, seperti pengendalian suku bunga, subsidi energi, dan peningkatan produksi pangan dalam negeri. Pola ini menunjukkan bahwa inflasi Indonesia cukup fluktuatif, tetapi masih dalam batas aman yang mencerminkan proses penyesuaian ekonomi nasional terhadap dinamika global (P. S. M. J. Silaban & Siagian, 2021).

Selain itu, inflasi yang rendah juga didorong oleh peningkatan efisiensi distribusi barang, stabilitas nilai tukar rupiah, dan penguatan sektor produksi domestik, terutama pangan dan energi. Kondisi ini memberikan sinyal positif terhadap daya beli masyarakat dan iklim investasi yang lebih kondusif (Tutupoho, 2019).

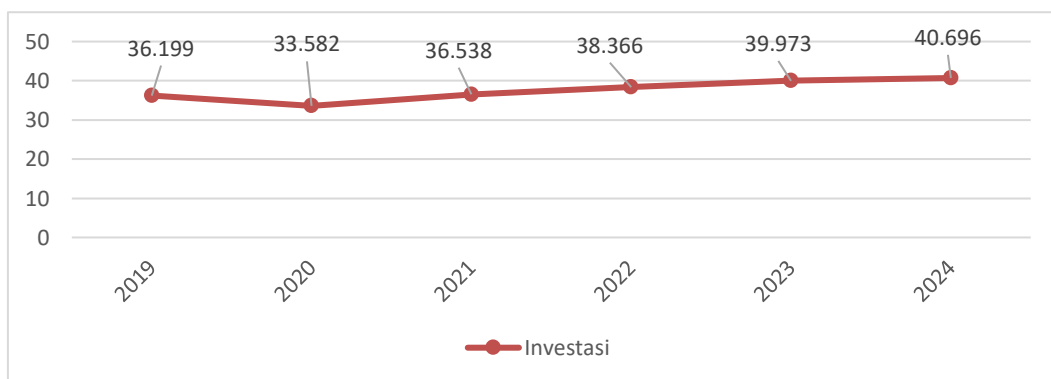
Penurunan inflasi dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini disebabkan oleh kombinasi kebijakan moneter yang ketat, penguatan nilai tukar rupiah, dan kestabilan harga pangan melalui pengendalian distribusi dan pasokan barang. Bank Indonesia secara konsisten menjaga suku bunga acuan untuk menahan tekanan harga, sementara pemerintah berhasil mengelola logistik pangan, energi, dan transportasi sehingga tidak terjadi lonjakan harga besar. Selain itu, rendahnya

permintaan agregat pasca pandemi juga turut menekan laju inflasi karena konsumsi masyarakat (Anggraeni, 2022)

Masalah pengangguran juga berhubungan dengan investasi karena Peningkatan investasi secara langsung menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor produktif seperti industri, konstruksi, dan jasa, sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang sebelumnya menganggur dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (Sanjiwo et al., 2022).

Menurut teori Harrod Domar dalam Stefanus (2017), dalam teorinya investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi *full employment*. hal ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, salah satunya faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat (Nashichin, 2024).

**Grafik 1.3**  
**Investasi di Indonesia Tahun 2019-2024**



sumber : Bank Indonesia 2025

Investasi di Indonesia tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 36,199 triliun rupiah karena kondisi ekonomi yang stabil, kepercayaan investor yang tinggi terhadap iklim usaha nasional, serta berbagai program pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan deregulasi investasi. Namun, pada tahun 2020 investasi menurun menjadi sekitar 33,582 triliun rupiah akibat pandemi COVID-19 yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi global, pembatasan mobilitas, serta terganggunya rantai pasokan dan aktivitas industri.

Tahun 2021 hingga 2024, tingkat investasi kembali meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan global, serta dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), peningkatan kemudahan berusaha, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, digital, dan manufaktur. Selain itu, stabilitas politik dan kebijakan fiskal yang terarah juga meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil membangun kembali daya tariknya sebagai tujuan investasi jangka panjang (Dewayani *et al.*, 2024).

Produk Domestik Bruto (PDB) punya hubungan yang kompleks dengan tingkat pengangguran di Indonesia. Secara umum, peningkatan investasi dan PDB dapat menurunkan pengangguran, namun efeknya bervariasi tergantung pada jenis investasi dan struktur ekonomi (Ayu, 2018). Peningkatan PDB mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang biasanya diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran (Triwahyuningtyas,*et al.* 2022).

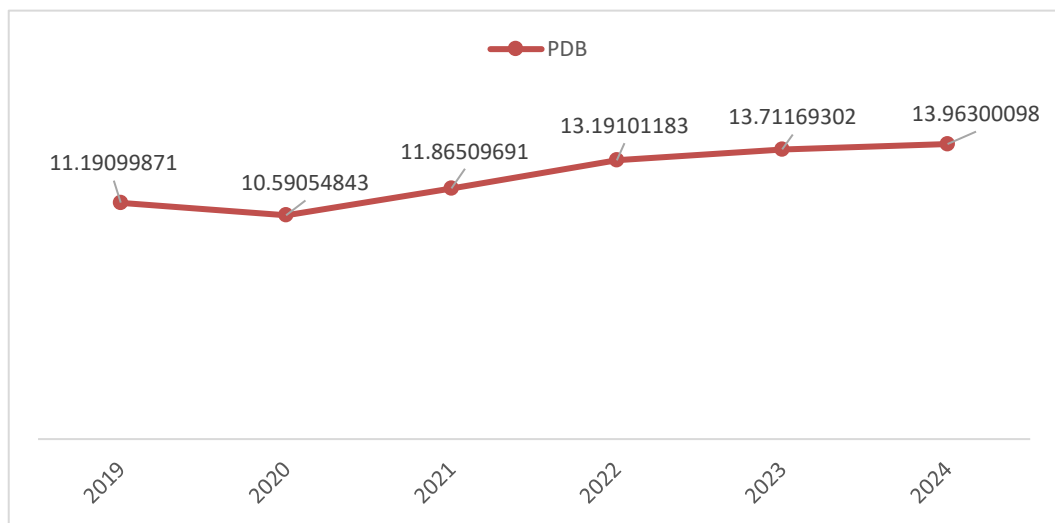
Apabila total PDB suatu negara meningkat, artinya sudah berlaku kenaikan atas permintaan produksi baik barang atau jasa. Peningkatan permintaan SDM tersebut akan turut membantu menurunkan angka pengangguran. PDB merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, hal tersebut karena semakin tingginya suatu negara meningkatnya permintaan barang dan jasa maka tingkat produksi yang dilakukan oleh negara tersebut akan meningkat, untuk dapat mencapai permintaan barang dan jasa yang di produksi tersebut maka negara tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga target yang dicapai meningkat, maka semakin tinggi tingkat produksi maka akan semakin tinggi tenaga kerja yang dibutuhkan hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pengangguran atau tingkat pengangguran akan mengalami penurunan yang tinggi (Naibaho & Nabila, 2021).

PDB (Produk Domestik Bruto) yang stabil dapat mencerminkan bagaimana kinerja suatu perekonomian di Indonesia di berbagai sektor yang ada. Tingkat PDB (Produk Domestik Bruto) yang tinggi mencerminkan bahwa komoditas ekspor kita lebih tinggi dibandingkan impor, yang memuat aktivitas perdagangan semakin aktif, kemudian penyerapan tenaga kerja dapat terjadi. Pemerintah juga dapat berkontribusi dalam kemampuan belanja pemerintah yang tentu menjadi kekuatan dalam menciptakan lapangan kerja. Ketika dilihat secara teori korelasi antara PDB (Produk Domestik Bruto) dan Tenaga Kerja harusnya memiliki hubungan yang positif. Yang artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja (Rahmiati & Panorama, 2022).

Produk Domestik Bruto mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Indonesia dimana apabila nilai produk domestik bruto meningkat

maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi disuatu negara akan meningkat. Barang dan jasa akhir yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran di indonesia, sehingga dapat dilihat pada diagram dibawah ini yaitu :

**Grafik 1.4**  
**Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2019-2024**



sumber : *Bank Indonesia 2025*

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 11,19 triliun rupiah, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil berkat kuatnya konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi dalam negeri. Namun, pada tahun 2020 PDB mengalami penurunan menjadi sekitar 10,59 triliun rupiah, akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi melambat secara signifikan. Banyak sektor seperti pariwisata, industri, dan perdagangan mengalami penurunan produktivitas karena pembatasan mobilitas dan penurunan permintaan global.

Tahun 2021 hingga 2024 PDB kembali meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional melalui program vaksinasi, kebijakan pemulihan ekonomi dari pemerintah, serta meningkatnya investasi dan ekspor. Sektor-sektor seperti industri manufaktur, pertanian, dan digital ekonomi mulai bangkit dan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan. Selain itu, dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif juga membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong produksi. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu pulih dan tumbuh kembali secara bertahap setelah terpukul oleh krisis akibat pandemi.

Fluktuasi PDB di Indonesia termasuk fase pertumbuhan yang pesat dan kemudian perlambatan atau penurunan menunjukkan ketergantungan kuat ekonomi pada kondisi makro seperti ketidakstabilan nilai tukar, inflasi tinggi, dan tekanan ekspor, di mana saat variabel tersebut memburuk, daya dorong pertumbuhan melemah sehingga PDB menurun. DB Indonesia tidak tumbuh secara konstan, tapi sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal (Deb Nath *et al.*, 2024).

Pengeluaran pemerintah adalah belanja negara untuk membiayai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, gaji pegawai, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Pengeluaran ini memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap tingkat pengangguran. Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk membeli barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja (Mahendra *et al.*, 2022).

Pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Dengan berinvestasi dalam berbagai sektor, pemerintah dapat secara langsung dan tidak langsung memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Alokasi pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur adalah bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai proyek seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, irigasi, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya. Pengeluaran ini dianggap sebagai investasi jangka panjang yang krusial untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan (Siregar, 2023).

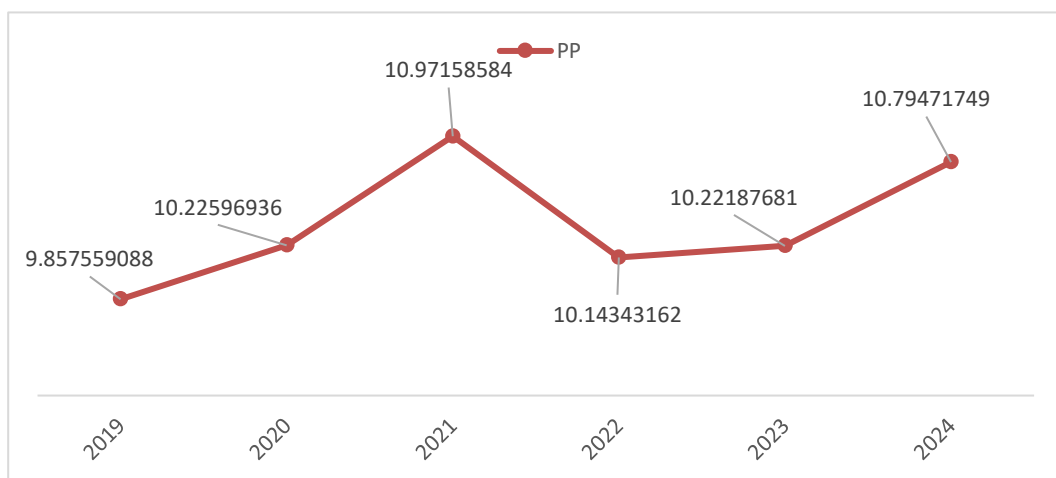
Pengeluaran pemerintah, terutama dalam infrastruktur, memiliki hubungan yang positif dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Investasi pemerintah dalam infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya mengurangi pengangguran (Purwanti & Rahmawati, 2021).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah tidak menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh lebih dulu, jadi pemerintah membuat anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, yang di Indonesia dijabarkan dalam Anggaran Rencana Belanja Negara (Ajeng, 2022).

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Keberhasilan pembangunan

di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Andini & Tinggi, n.d.2018). pada diagram di bawah ini dapat dilihat Tingkat pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran di Indonesia yaitu :

**Grafik 1.5**  
**Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2019-2024**



sumber : Bank Indonesia 2025

Pengeluaran pemerintah tahun 2019 mengalami penurunan karena pemerintah saat itu berfokus pada efisiensi anggaran dan pengendalian defisit fiskal, dengan menekan belanja yang kurang produktif dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021 pengeluaran pemerintah meningkat signifikan akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk program pemulihan ekonomi nasional, seperti bantuan sosial, subsidi kesehatan, serta dukungan untuk dunia usaha dan pendidikan.

Tahun 2022 pengeluaran pemerintah kembali menurun, karena pandemi mulai terkendali dan pemerintah mulai mengurangi stimulus fiskal serta mengalihkan fokus ke pemulihan ekonomi yang lebih mandiri. Meskipun demikian, dari tahun 2023 hingga 2024 pengeluaran pemerintah kembali meningkat, seiring dengan upaya mempercepat pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengarahkan belanja negara untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi.

Penurunan pengeluaran pemerintah seperti yang dipelajari melalui simulasi CGE pada kasus Indonesia menunjukkan bahwa meski ada potensi peningkatan investasi swasta dan ekspor, pemotongan belanja publik justru dapat mengurangi lapangan kerja di sektor non-tradable yang menyerap tenaga lokal, sehingga berdampak negatif terhadap kemampuan pemerintah untuk mengurangi pengangguran (Kuncoro, 2014).

Pengeluaran pemerintah juga dapat juga digunakan untuk membiayai investasi dalam sektor-sektor penting, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan teknologi. investasi juga dapat meningkatkan produktivitas dengan daya saing ekonomi, yang juga berkontribusi pada pertumbuhan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Sehingga dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan.

## **1.2 Perumusan Masalah Penelitian**

Perumusan masalah merupakan suatu cara untuk dapat mengetahui tentang permasalahan yang diteliti saat ini, karena dengan membuat perumusan masalah akan lebih mudah untuk mendapatkan suatu permasalahan tersebut.

1. Seberapa besarkah inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
2. Seberapa besarkah investasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
3. Seberapa besarkah Produk Domestik Bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
4. Seberapa besarkah Pengeluaran Pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas sehingga dengan permasalahan itu maka berikut ini tujuan dari perumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung Inflasi terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. Serta untuk menguji apakah dampak inflasi tersebut dimoderasi oleh tingkat investasi angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Serta untuk menguji apakah dampak investasi tersebut dapat meningkatkan lapangan kerja yang luas.
3. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. serta menguji apakah peningkatan PDB dapat

mengurangi pengangguran dengan mempertimbangkan peningkatan angkatan kerja dan kebijakan pemerintah yang ada.

4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran di Indonesia Serta untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah, khususnya di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan ketenagakerjaan, berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini banyak sekali harapan manfaat yang ingin penulis dapatkan terutama dari sudut ilmu pengetahuan mengenai pengaruh hubungan yang ditimbulkan dari tingkat inflasi dan investasi terhadap jumlah pengangguran di Indonesia. Manfaat lainnya yang ingin penulis peroleh adalah kesempatan untuk membahas segala teori yang didapat selama perkuliahan.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu linguistik atau kebahasaan. Berkenaan dengan hal ini yaitu sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca khususnya mengenai implikatur dan inferensi pada percakapan dalam buku.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai inferensi dan diharapkan dapat menambah ilmu penelitalain tentang pragmatik khususnya tentang implikatur dan inferensi.